



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUBAGYO HARYANTO**
2. Jabatan : **PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN**
3. NHK : **511135**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.390.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 502 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1.955 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 237 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 2.000 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 172.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.



150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.566.000.000
III. HUTANG	Rp.	65.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.501.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.